



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Raya Sukowati No. 21 Sragen
Telp/Fax (0271) 891017 Fax (0271) 894960
Website: <http://diskumindag.sragenkab.go.id>
Email: diskumindag@sragenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang muncul serta strategi pengelolaannya selama tahun berjalan. Penyusunannya didasarkan pada pertimbangan strategis, hasil evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian arah kebijakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di lingkungan perangkat daerah.

Dokumen ini memuat secara komprehensif tujuan, dasar pertimbangan, hasil evaluasi pelaksanaan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama satu tahun. Seluruhnya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen secara berkelanjutan.

Komitmen dan motivasi tumbuh dari keberhasilan dalam mengaktualisasikan diri melalui pelaksanaan kegiatan yang bermakna. Kami berharap dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi, menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dimanfaatkan sesuai dengan harapan seluruh pihak terkait.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720912 199202 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 20257

2.1. Hasil Capaian Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.. 7

2.2. Analisis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 46

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 46

3.2. Program dan Kegiatan 52

BAB IV PENUTUP 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung terwujudnya good governance dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen serta Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sragen.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sragen dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tahun 2025 diimplementasikan melalui program dan kegiatan serta anggaran yang tercermin melalui RKA dan DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 sebagai upaya mewujudkan tugas dan fungsi dinas serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 perlu dilakukan analisis pengendalian pelaksanaannya pada triwulan II sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja. Jika dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II ada ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan perkembangan keadaan atau perlu penyesuaian terkait output dan anggaran maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan perubahan atas Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikato Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sisa tahun berjalan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025:

1. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antar bidang teknis dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memetakan kebutuhan anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
1.1		Latar Belakang
1.2		Landasan Hukum
1.3		Maksud dan Tujuan
1.4		Sistematika Penulisan
Bab II	:	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
		Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II Tahun 2025;
Bab III	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
		Berisi tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2025;
Bab IV	:	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025

2.1. Hasil Capaian Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2. 1

Hasil Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Sampai Triwulan II

Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	19.813.296.446,00	50,00	9.332.868.395,00	50,00	47,10
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	16	14.786.000,00	8	10.991.000,00	50,00	74,33
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	7.008.000,00	2	5.958.000,00	50,00	85,02
4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	7.778.000,00	6	5.033.000,00	50,00	64,71
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan ASN	Bulan	14	16.513.333.646,00	6	8.034.651.959,00	42,86	48,66

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	143	16.513.333.646,00	142	8.034.651.959,00	99,30	48,66
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	153.096.000,00	6	81.829.400,00	50,00	53,45
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.000.000,00	6	2.038.000,00	50,00	29,11
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.625.000,00	6	14.104.000,00	50,00	51,06
10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.971.000,00	6	30.576.500,00	50,00	87,43
11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	21.000.000,00	6	13.353.400,00	50,00	63,59
12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	62.500.000,00	6	21.757.500,00	50,00	34,81
13		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarpras pengadaan barang/penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	21	306.284.000,00	4	8.800.000,00	19,05	2,87
14		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	118.195.000,00	0	0,00	0,00	0,00
15		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80.713.000,00	0	0,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	107.376.000,00	4	8.800.000,00	26,67	8,20
17		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang/pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	Bulan	12	1.459.526.000,00	6	580.537.631,00	50,00	39,78
18		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.226.400.000,00	6	481.632.131,00	50,00	39,27
19		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9.980.000,00	6	5.927.000,00	50,00	59,39
20		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	223.146.000,00	6	92.978.500,00	50,00	41,67
21		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	1.366.270.800,00	6	616.058.405,00	50,00	45,09
22		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	89	839.344.000,00	42	334.122.605,00	47,19	39,81
23		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	508.291.800,00	1	273.930.800,00	50,00	53,89

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	18.635.000,00	16	8.005.000,00	66,67	42,96
25		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	%	4,20	16.799.000,00	0,00	15.851.000,00	0,00	94,36
26		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	23,90	16.799.000,00	17,60	15.851.000,00	73,64	94,36
27		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	207	16.799.000,00	207	15.851.000,00	100,00	94,36
28		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	%	29,00	28.732.700,00	0,00	4.941.000,00	0,00	17,20
29		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	52	28.732.700,00	0	4.941.000,00	0,00	17,20

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	168	28.732.700,00	84	4.941.000,00	50,00	17,20
31		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	%	78,00	9.614.000,00	52,63	0,00	67,47	0,00
32		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	62,00	9.614.000,00	52,63	0,00	84,89	0,00
33		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	45	9.614.000,00	45	0,00	100,00	0,00
34		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	%	3,00	14.722.000,00	6,37	12.614.000,00	212,33	85,68
35		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan penataan manajemen	%	66,00	14.722.000,00	32,89	12.614.000,00	49,83	85,68
36		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	75	14.722.000,00	75	12.614.000,00	100,00	85,68

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya	%	1,50	117.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang dilakukan pemberdayaan	%	5,30	117.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	285	86.994.800,00	0	0,00	0,00	0,00
40		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	35	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00
41		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	200	28.374.200,00	0	0,00	0,00	0,00
42		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	%	20,43	1.166.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Persentase usaha mikro yang dilakukan pengembangan	%	20,40	1.166.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
44		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	139	1.166.050.000,00	0	0,00	0,00	0,00
45		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang memenuhi ketentuan per tahun	%	47,92	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah movev toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang dilaksanakan	Kali	6	11.600.000,00	2	0,00	33,33	0,00
47		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	22,00	11.600.000,00	4,00	0,00	18,18	0,00
48		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik	%	58,70	2.378.453.500,00	55,56	885.843.250,00	94,65	37,24

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	Pasar	25	2.351.933.500,00	5	881.977.000,00	20,00	37,50
50		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	9	396.380.500,00	2	7.901.000,00	22,22	1,99
51		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	45	1.955.553.000,00	22	874.076.000,00	48,89	44,70
52		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang dibina sarana distribusi perdagangannya	Pasar	45	26.520.000,00	12	3.866.250,00	26,67	14,58
53		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	15.672.500,00	1	1.666.250,00	25,00	10,63
54		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	10.847.500,00	1	2.200.000,00	50,00	20,28
55		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	93,10	30.470.000,00	34,21	0,00	36,75	0,00
56		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan SPBU pertashop dan agen LPG	%	100,00	9.127.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
57		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	40	9.127.000,00	24	0,00	60,00	0,00
58		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pasar	%	69,57	11.628.000,00	20,00	0,00	28,75	0,00
59		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	90	11.628.000,00	52	0,00	57,78	0,00
60		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan agen/distributor pupuk bersubsidi	%	100,00	9.715.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00
61		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	60	9.715.000,00	15	0,00	25,00	0,00
62		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM/UMKM pelaku ekspor	%	2,00	13.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan bagi IKM/UMKM potensi ekspor	kali	2	13.399.000,00	0	0,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
64		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	50	13.399.000,00	22	0,00	44,00	0,00
65		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	100,00	102.262.000,00	56,40	37.702.000,00	56,40	36,87
66		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah lokasi yang akan ditera/tera ulang	Kecamatan	20	102.262.000,00	20	37.702.000,00	100,00	36,87
67		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	5.608	97.562.000,00	3.163	35.686.000,00	56,40	36,58
68		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	650	4.700.000,00	313	2.016.000,00	48,15	42,89
69		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional	%	60,00	119.888.000,00	40,00	116.904.000,00	66,67	97,51
70		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran produk unggulan yang dilaksanakan	Kali	1	119.888.000,00	1	116.904.000,00	100,00	97,51
71		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	25	119.888.000,00	25	116.904.000,00	100,00	97,51

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
72		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK	%	3,03	717.556.100,00	1,49	160.196.268,00	49,17	22,33
73		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah sentra industri sesuai RPIK	Unit	68	717.556.100,00	67	160.196.268,00	98,53	22,33
74		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	367.681.100,00	2	156.477.768,00	66,67	42,56
75		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	349.875.000,00	0	3.718.500,00	0,00	1,06
76		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi	%	100,00	2.744.900,00	15,00	0,00	15,00	0,00
77		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi pemenuhan ijin usaha industri	Dokumen	1	2.744.900,00	0	0,00	0,00	0,00
78		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk	Dokumen	1	2.744.900,00	0	0,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
					Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
79		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	47,87	1.649.800,00	5,06	0,00	10,57	0,00
80		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	unit	45	1.649.800,00	9	0,00	20,00	0,00
81		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1.649.800,00	0	0,00	0,00	0,00

2.2. Analisis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dari tabel 2.1 secara umum diketahui bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sudah mencapai 42,30% sedangkan untuk tingkat penyerapan anggaran mencapai 41,98%. Atau sebesar Rp. 10.566.919.913,- dari anggaran penetapan tahun 2025 sebesar Rp. 25.171.449.446,-

- a. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang capaian kinerjanya masih nol persen sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :
 1. Pada Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi anggaran dan kinerja masih nol dikarenakan proses pengadaan menggunakan sistem elektronik yaitu E-Katalog versi baru (Versi 6) yang membutuhkan penyesuaian dan pelaksanaannya menunggu legalitas penerapan aturan yang baru yaitu Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga menyebabkan keterlambatan dan butuh waktu yang lama dalam penyesuaiannya, dan rencana direalisasikan di triwulan III.
 2. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi anggaran dan capaian kinerjanya masih nol dikarenakan sesuai jadwal direncanakan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, dengan pertimbangan butuh waktu yang cukup untuk proses mencari harga pembandingan dari beberapa penyedia dan menentukan kualitas barang yang akan dibeli agar sesuai spesifikasi yang diinginkan. Rencana kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III.
 3. Pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi capaian kinerja masih nol dikarenakan sampai dengan triwulan II belum terdapat penambahan jumlah koperasi aktif (beberapa koperasi belum melaksanakan RAT dan tidak melaporkannya ke OPD pembina).
 4. Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja masih nol, hal ini dikarenakan meskipun penilaian kesehatan telah dilaksanakan terhadap 84 unit usaha koperasi (50%) dari target 168 unit koperasi, namun hasil penilaian tersebut masih dalam proses pengolahan, rekapitulasi, dan penetapan kategori tingkat kesehatan koperasi. Dengan demikian, sampai dengan periode pelaporan ini belum terdapat koperasi yang secara resmi ditetapkan dalam kategori “sehat”. Realisasi anggaran pada program dan kegiatan masing-masing sebesar 17,20%, hal tersebut dikarenakan masih dalam tahap proses SPJ / pencairan anggaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Pada program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terdapat 3 (tiga) subkegiatan yang capaian kinerjanya masih nol persen, yaitu pada Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dan Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Hal ini dikarenakan sesuai rencana dilaksanakan pada triwulan III, dengan pertimbangan bahwa pada subkegiatan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat dalam proses pencarian peserta pelatihan agar sesuai dan tepat sasaran, terutama bagi penerima manfaat/bantuan peralatan usaha yang sudah terdata dalam DTKS (Data Tunggal Kesejahteraan Sosial) ataupun sesuai 21 desa prioritas miskin.
6. Pada Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi usaha Kecil, dan Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, Capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Program, Kegiatan dan Subkegiatan tersebut masing-masing masih 0% (nol persen). Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan III / sesuai jadwal, dengan pertimbangan bahwa pada subkegiatan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan Pemerintah Desa

setempat dalam proses pencarian peserta pelatihan agar sesuai dan tepat sasaran, terutama bagi penerima manfaat/bantuan peralatan usaha yang sudah terdata dalam DTKS (Data Tunggal Kesejahteraan Sosial).

7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0% (nol persen), hal ini dikarenakan belum terdapat penambahan jumlah toko modern sampai dengan triwulan II.
8. Pada Program Pengembangan Ekspor dan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, masing-masing capaian kinerja dan realisasi anggarannya masih 0% (nol persen). Hal ini dikarenakan meskipun telah dilakukan proses penjaringan dan seleksi awal terhadap 22 pelaku usaha dari target 50, namun pelaksanaan misi dagang sebagai bentuk pembinaan IKM/UKM potensial ekspor baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
9. Pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat capaian kinerja pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, capaian kinerja masih 0% (nol persen) dan realisasi anggaran sebesar 1,06%, hal tersebut dikarenakan masih dalam tahap koodinasi dengan Pemerintah Desa setempat dan proses pencarian peserta pelatihan agar sesuai dan tepat sasaran terutama bagi penerima manfaat/bantuan sosial yang sudah terdata dalam DTKS (Data Tunggal Kesejahteraan Sosial).
10. Pada Kegiatan Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota dan Subkegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS RBA, capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing masih 0% (nol persen), karena masih dalam tahap pelaksanaan koordinasi

dan proses survey ke industri kecil menengah dalam rangka verifikasi teknis terkait rekomendasi legalitas usaha.

11. Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing masih 0% (nol persen) karena belum ada industri menengah-besar yang mendaftarkan usahanya dalam aplikasi SIINas.
- b. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang capaian kinerjanya sesuai/tercapai target sampai dengan triwulan II:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 47,10%.
 2. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 74,33%. Termasuk didalamnya Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 85,02% dan Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 64,71%, faktor pendorong tercapainya target tersebut karena dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah/ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen telah disusun tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan.
 3. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian kinerja sebesar 42,86% dan realisasi anggaran sebesar 48,66%, yang didalamnya mencakup Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 99,30% dan realisasi anggaran 48,66%. Capaian realisasi telah sesuai target sampai dengan triwulan ke II, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pencairan gaji dan tunjangan ASN/ diberikan tepat waktu.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran 53,45%, termasuk didalamnya dengan 5 Subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 29,11%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 51,06%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realissai anggaran 87,43%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 63,59%.
- e. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 34,81%.

Faktor pendorong tercapainya target sampai dengan triwulan II pada 5 Sub kegiatan di atas dipengaruhi oleh tersedianya jumlah yang sesuai kebutuhan dan waktu penyediaan yang tepat. Sedangkan penghambat capaian realisasi anggaran disebabkan karena SPJ/pencairan anggaran masih dalam proses.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 19,05 % dan realisasi anggaran sebesar 2,87% termasuk didalamnya Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja 26,67% dan realisasi anggaran sebesar 8,20%.
6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 39,78%, termasuk 3 Subkegiatan didalamnya, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 39,78%. Subkegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran 59,39%, dan Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran

sebesar 41,67%. Faktor pendorong tercapainya target pada ketiga Subkegiatan dan pada Kegiatan adalah laporan yang disusun secara tepat waktu setiap bulannya sesuai kebutuhan, namun capaian anggaran masih dibawah target triwulan, hal ini dikarenakan pencairan anggaran masih dalam proses SPJ pencairan anggaran.

7. Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 50% dan rrealisasi anggaran sebesar 45,09%, termasuk didalamnya 3 sub kegiatan yang semua capaian kinerjanya sesuai target, diantaranya adalah:
 - a. Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 39,81%.
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 53,89%.
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pprasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan capaian kinerja sebesar 66,67% dan realisasi anggaran sebesar 42,96%.

Faktor pendorong dari Kegiatan serta dan Subkegiatan di atas adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah dan kapasitas SDM yang memadai guna mendukung tercapainya target pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.

8. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebesar 75,64% dan realisasi anggaran sebesar 94,36%, termasuk didalamnya Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 94,36%. Tercapainya target kinerja dan anggaran dipengaruhi beberapa faktor

pendorong diantaranya kegiatan pendataan koperasi yang dilaksanakan pada triwulan pertama dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan, pemberdayaan SDM Bidang teknis terkait pendataan dengan membentuk beberapa tim guna keberhasilan pencapaian target pelaksanaan lebih maksimal dan tepat waktu.

9. Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 50% realisasi anggaran sebesar 17,20%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan pada subkegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan yaitu dimulai bulan pada triwulan II sampai dengan triwulan III, serta dibentuk tim guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai yang diharapkan.
10. Subkegiatan Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 85,68%. Faktor pendorong yang mendukung tercapainya kinerja subkegiatan adalah kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Koperasi memiliki minat yang tinggi ditunjukkan dengan keikutsertaan pengurus koperasi pada Bimbingan teknis pemberdayaan dan penataan manajemen koperasi.
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 94,64% dan realisasi anggaran 37,24%. Capaian kinerja yang sesuai target didukung oleh 2 Kegiatan didalamnya yaitu:
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 20% dan realisasi anggaran sebesar 37,50 termasuk didalamnya 2 Subkegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, yaitu Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian

kinerja sebesar 22,22% dan realisasi anggaran sebesar 1,99%, dan Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 48,89% dan realisasi anggaran sebesar 44,70%. Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu, koordinasi dilakukan secara intens dan tepat terkait perbaikan / rehab ringan pasar dan kebutuhan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih baik dan representatif, serta dukungan anggaran yang memadai guna menunjang fasilitasi pengelolaan pasar.

- b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada Subkegiatan Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 20,28%. Faktor pendorong tercapainya kinerja dan realisasi anggaran adalah pelaksanaan kegiatan monev pengelolaan pasar yang rutin dilaksanakan sesuai jadwal, ketersediaan SDM bidang teknis yang memadai dan telah dibentuk tim guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, koordinasi yang baik antara pengelola pasar dengan OPD yang dalam hal ini bidang Sarana Distribusi Perdagangan selaku pengampu pasar.

- 12. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 60% dan realisasi anggaran 0%. hal tersebut dipengaruhi oleh capaian pada Subkegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dengan capaian kinerja sebesar 60% dan realisasi anggaran sebesar 0%. Faktor pendorong dari tercapainya kinerja adalah pelaksanaan kegiatan pemantauan/ monev terkait ketersediaan stok BBM di SPBU dan pertashop, serta monev di agen dan pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Sragen secara tepat waktu sesuai schedul yang telah ditetapkan, dukungan

SDM bidang teknis yang memadai dan berkualitas sehingga guna mewujudkan keberhasilan program melalui pengawasan /pemantauan rutin, cepat berkoordinasi dan tanggap dalam penyelesaian masalah. Realisasi anggaran masih 0% dikarenakan masih proses menyusun kelengkapan dokumen administrasi untuk pencairan anggaran.

13. Subkegiatan Pemantauan harga dan stok barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 57,78% dan realisasi anggaran 0%. Faktor pendorong capaian target kinerja subkegiatan ini adalah pemantauan / monev harga dan stock bahan pokok dan kebutuhan penting ke pasar-pasar di Kabupaten Sragen dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu yang juga diperlukan untuk update harga / dilaporkan secara rutin. Ketersediaan SDM yang memadai pada bidang teknis terkait monev dan update harga, serta pelaporan. Capaian realisasi anggaran 0% dikarenakan masih tahap proses penyusunan administrasi guna SPJ pencairan anggaran.
14. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 25% dan realisasi anggaran sebesar 0%, hal tersebut dipengaruhi oleh capaian Sub kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan capaian kinerja sebesar 25% dan realisasi anggaran sebesar 0%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai schedule yang telah di susun pada triwulan I, selanjutnya sesuai perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata kelola Pupuk Bersubsidi pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pengawasan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak berwenang lagi dalam pemantauan/ pengawasan pupuk bersubsidi.

15. Sub kegiatan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan dengan capaian kinerja sebesar 44% dan realisasi anggaran 0%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja pada Triwulan II adalah kegiatan monev IKM/UKM potensial dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi ekspor telah dilaksanakan sesuai schedule yang direncanakan, dukungan SDM yang memadai, antusiasme IKM/UKM potensial ekspor untuk dapat mengikuti sosialisasi ekspor guna meningkatkan pemahaman terkait prosedur ekspor. Sedangkan realisasi anggarannya masih 0% dikarenakan masih tahap proses penyusunan administrasi SPJ pencairan anggaran.
16. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan capaian kinerja sebesar 56,40 % dan realisasi anggaran sebesar 36,87%, dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 36,87%, termasuk didalamnya 2 Subkegiatan yang juga tercapai target kinerjanya, yaitu:
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan capaian kinerja 56,40% dan realisasi anggaran 36,58%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah pelaksanaan sidang tera tera ulang alat UTTP di pasar, SPBU, dan sektor industri di wilayah Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam hal tera-ter ulang alat UTTP yg dimilikinya.
 - b. Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan capaian 48,15% dan realisasi anggaran sebesar 42,89%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pengawasan metrologi legal sesuai jadwal yang telah ditetapkan, meningkatnya kesadaran serta partisipasi pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan di bidang metrologi legal, serta adanya dukungan dari petugas metrologi dalam melaksanakan tugas pembinaan secara tepat sasaran.

17. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan capaian kinerja 66,67% dan realisasi anggaran sebesar 97,51. Dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang capaian kinerjanya sudah 100% dan realisasi anggaran 97,51%, termasuk didalamnya Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 97,51%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan daerah sesuai dengan rencana, partisipasi aktif pelaku UMKM dalam mengikuti fasilitasi promosi produk dalam negeri, serta tingginya antusiasme masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung penggunaan produk unggulan lokal, sehingga capaian indikator program, kegiatan, maupun subkegiatan dapat terpenuhi secara optimal.
18. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan capaian kinerja sebesar 49,17% dan realisasi anggaran sebesar 22,33% dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 98,53% dan realisasi anggaran sebesar 22,33%, termasuk didalamnya Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang memiliki capaian kinerja 66,67% dan realisasi anggaran sebesar 42,56%. Faktor pendorong yang mendukung tercapainya kinerja adalah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dukungan perangkat daerah ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam rapat koordinasi serta penyampaian data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen pembangunan sarana dan prasarana industri.

Tabel 2. 2
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN ANALISIS PERUBAHAN KINERJA

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	28.000.000	16.799.000	15.851.000	56,61%	948.000		
2.17.03.2, 01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28.000.000	16.799.000	15.851.000	94,36%	948.000		
2.17.03.2, 01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	16.799.000	15.851.000	94,36%	948.000	Sudah sesuai kebutuhan, Kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pendataan koperasi selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran. Pencairan anggaran diselesaikan pada Triwulan III
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	55.000.000	28.732.700	4.941.000	17,20%	23.791.700		
2.17.04.2, 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	28.732.700	4.941.000	17,20%	23.791.700		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.04.2, 01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	28.732.700	4.941.000	17,20%	23.791.700	Kegiatan Monev atas penilaian kesehatan tahun lalu telah terlaksana, kegiatan penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan mulai triwulan III. Memerlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pameran Hari Koperasi Nasional.	Perlu penambahan anggaran untuk biaya pelaksanaan pameran Hari Koperasi Nasional
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	15.000.000	9.614.000	0	0,00%	9.614.000		
2.17.05.2, 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	9.614.000	0	0,00%	9.614.000		
2.17.05.2, 01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	15.000.000	9.614.000	0	0,00%	9.614.000	Sudah sesuai kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan telah selesai di triwulan II	- Tidak perlu penambahan/pengurangan anggaran. - Pencairan anggaran direalisasikan di triwulan III
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	24.250.000	14.722.000	12.614.000	85,68%	2.108.000		
2.17.06.2, 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.250.000	14.722.000	12.614.000	85,68%	2.108.000		
2.17.06.2, 01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0,00%	0	Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan Pembentukan/pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.	Perlu penambahan anggaran untuk Pembuatan Akta Notaris Koperasi (KDMP)

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kab. Sragen sejumlah 208 Koperasi. Untuk pendirian KDMP tersebut memerlukan biaya Pembuatan Akte Notaris.	
2.17.06.2, 01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	24.250.000	14.722.000	12.614.000	85,68%	2.108.000	Sudah sesuai kebutuhan, Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilakuka	- Tidak perlu penambahan/pengurangan anggaran. - Pencairan anggaran direalisasikan di triwulan III
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	209.061.000	117.869.000	0	0,00%	117.869.000		
2.17.07.2, 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	209.061.000	117.869.000	0	0,00%	117.869.000		
2.17.07.2, 01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	148.148.000	86.994.800	0	0,00%	86.994.800	Kegiatan di Triwulan II tahap proses koordinasi dengan pihak desa prioritas terkait peserta pelatihan.	- Perlu pengurangan anggaran pada Belanja Registrasi, belanja perjalanan dinas, dan ATK. - Melaksanakan pelatihan / Penyuluhan Keamanan Pangan bagi UMKM di triwulan III .
2.17.07.2, 01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.000.000	2.500.000	0	0,00%	2.500.000	Sudah sesuai kebutuhan, Rencana pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pada triwulan III dan IV	- Tidak perlu penambahan/pengurangan anggaran

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Triwulan III dan IV dilaksanakan Monev UMKM pasca pelatihan
2.17.07.2, 01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	55.913.000	28.374.200	0	0,00%	28.374.200	Sudah sesuai kebutuhan. Pada Triwulan II tahap proses koordinasi dengan pihak desa prioritas terkait peserta pelatihan .	- Tidak perlu penambahan/pengurangan anggaran - Melaksanakan pelatihan / sosialisasi permodalan bagi UMKM di triwulan III
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.241.000.000	1.166.050.000	0	0,00%	1.166.050.000		
2.17.08.2, 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.241.000.000	1.166.050.000	0	0,00%	1.166.050.000		
2.17.08.2, 01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.241.000.000	1.166.050.000	0	0,00%	1.166.050.000	Pengembangan UMKM di Kabupaten Sragen supaya lebih produktif dan berdaya saing salah satunya melalui pelatihan/Bimtek serta pemberian bantuan peralatan usaha.	Perlu penambahan anggaran untuk pelatihan/Bimtek dan pengadaan Bantuan peralatan bagi UMKM
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.000.000	11.600.000	0	0,00%	11.600.000		
3.30.02.2, 01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.000.000	11.600.000	0	0,00%	11.600.000		
3.30.02.2, 01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	20.000.000	11.600.000	0	0,00%	11.600.000	Kegiatan Monev terhadap toko modern perseorangan dan TDG sesuai schedule triwulan II telah di laksanakan.	- Perlu penambahan anggaran untuk dukungan sosialisai kepada toko modern perseorangan/non jejaring yang potensial dan TDG.

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Kegiatan sosialisasi kepada toko modern perseorangan/non jejaring dan TDG masih membutuhkan dukungan narasumber yang berkompeten supaya lebih maksimal.	- Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi sesuai schedule di triwulan III dan IV
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.400.382.000	2.351.933.500	885.843.250	37,66%	1.466.090.250		
3.30.03.2, 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.354.365.000	2.351.933.500	881.977.000	37,50%	1.469.956.500		
3.30.03.2, 01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	398.812.000	396.380.500	7.901.000	1,99%	388.479.500	Pasar sebagai sarana distribusi perdagangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi pasar yang baik dan representatif sangat diperlukan guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang serta pengunjung pasar, sehingga diharapkan dapat menarik pengunjung/pembeli di pasar, akibatnya akan berpengaruh pada meningkatkan omset penjualan. Beberapa pasar di Kabupaten Sragen kondisinya sudah tua sehingga memerlukan perawatan/perbaikan secara berkala setiap tahunnya	- Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan /perbaikan ringan pasar yang belum teranggarkan (Pasar: Sukowati, Masaran, Bunder, Sukodono, Sambungmacan, Tanon) - Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi di triwulan III dan IV (sesuai schedule)

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.03.2, 01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.955.553.000	1.955.553.000	874.076.000	44,70%	1.081.477.000	Kegiatan telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (sesuai schedule), diantaranya pengadaan kerts thermal parkir /pasar, pengadaan karcis retribusi pasar, honorarium/upah tenaga kebersihan pasar. Masih perlu penyesuaian terkait tenaga kebersihan pasar yang mengundurkan diri.	- Perlu penyesuaian /pengurangan anggaran pada honor tenaga kebersihan pasar yang mengundurkan diri - Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi di Triwulan III dan IV
3.30.03.2, 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	46.017.000	26.520.000	3.866.250	14,58%	22.653.750		
3.30.03.2, 02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.667.000	15.672.500	1.666.250	10,63%	14.006.250	Monev Pedagang Kaki Lima di CFD rutin dilaksanakan sesuai jadwal, beberapa masih proses menyusun administrasi pencairan anggaran Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima masih dalam proses koordinasi dengan pihak terkait.	- Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran. - Melaksanakan kegiatan selanjutnya /pembinaan PKL sesuai jadwal triwulan III dan IV - Menyelesaikan administrasi kegiatan yang sdh terlaksana untuk pencairan anggaran
3.30.03.2, 02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.350.000	10.847.500	2.200.000	20,28%	8.647.500	Monev Pengelolaan Pasar telah dilaksanakan 3 kali. Realisasi anggaran menunggu pencairan di Triwulan III.	- Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran. - Pencairan anggaran dijadwalkan pada Triwulan III.
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	57.000.000	32.190.500	0	0,00%	32.190.500		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.04.2, 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	10.847.500	0	0,00%	10.847.500		
3.30.04.2, 01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.000.000	10.847.500	0	0,00%	10.847.500	Kegiatan pemantauan/monev stock BBM di SPBU dan Pertashop, serta monev LPG di tingkat agen dan pangkalan telah dilaksanakan sesuai schedule, sedangkan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha BBM dan LPG belum terlaksana direncanakan di TW IV, namun masih perlu dukungan utk tercapainya keberhasilan kegiatan.	- Perlu penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha BBM dan LPG. - Pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana pada Triwulan III/IV.
3.30.04.2, 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.000.000	11.628.000	0	0,00%	11.628.000		
3.30.04.2, 02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	11.628.000	0	0,00%	11.628.000	Kegiatan Monev Harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting telah dilaksanakan sesuai jadwal s/d TW II, namun masih diperlukan monev yang lebih intens menjelang HBKN (Natal dan tahun baru), serta rapat koordinasi pra/pasca pelaksanaan monev.	- Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemantauan harga dan stock Bapokting menjelang HBKN (Natal dan Tahun Baru), serta Biaya makanan dan minuman rapat koordinasi. - Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai schedule yang direncanakan pada TW III dan IV

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.04.2, 03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	9.715.000	0	0,00%	9.715.000		
3.30.04.2, 03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.000.000	9.715.000	0	0,00%	9.715.000	Sesuai Perpres No 6 Tahun 2025 Tata Kelola Pupuk Bersubsidi akan dikelola oleh Dinas Pertanian	Perlu pengurangan anggaran, untuk Penyesuaian PerpresNo 6 Tahun 2025 bahwa Tata Kelola Pupuk Bersubsidi akan dikelola oleh Dinas Pertanian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	30.000.000	13.399.000	0	0,00%	13.399.000		
3.30.05.2, 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	13.399.000	0	0,00%	13.399.000		
3.30.05.2, 01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	30.000.000	13.399.000	0	0,00%	13.399.000	Kegiatan monev IKM / UKM potensial ekspor telah dilaksanakan sesuai schedul, namun IKM/UKM potensial di Kabupaten Sragen sangat banyak sehingga membutuhkan volume monev yang lebih banyak. Kegiatan sosialisasi ekspor yang direncanakan di TW IV masih memerlukan dukungan demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan kegiatan	- Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi IKM/UKM potensial ekspor dan dukungan untuk kegiatan sosialisasi ekspor (uang saku peserta) - Melanjutkan Monev IKM/UKM potensial di TW III dan IV dan melaksanakan Sosialisasi di TW IV
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	131.500.000	102.262.000	37.702.000	36,87%	64.560.000		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.06.2, 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	131.500.000	102.262.000	37.702.000	36,87%	64.560.000		
3.30.06.2, 01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	123.000.000	97.562.000	35.686.000	36,58%	61.876.000	Kegiatan tera/tera ulang alat UTTP telah dilaksanakan sebagian di Pasar, SPBU , industri/pabrik sesuai jadwal s/d TW II, namun di th 2025 ada penambahan tera /tera ulang dr pangkalan gas sehingga SKHP tidak mencukupi.	- Perlu penambahan anggaran untuk pengadaan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) - Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal di TW III dan IV
3.30.06.2, 01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.500.000	4.700.000	2.016.000	42,89%	2.684.000	Sudah sesuai kebutuhan	Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	180.000.000	119.888.000	116.904.000	97,51%	2.984.000		
3.30.07.2, 01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	180.000.000	119.888.000	116.904.000	97,51%	2.984.000		
3.30.07.2, 01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	180.000.000	119.888.000	116.904.000	97,51%	2.984.000	Kegiatan pameran sragen expo telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun dukungan terkait event Solo Raya Great Sale yang diikuti oleh Kab/Kota se Solo Raya belum teranggarkan.	- Perlu penambahan anggaran untuk mendukung event SoloRaya Great sale (berupa Biaya Perjalanan Dinas) - Menyelesaikan proses administrasi pencairan anggaran pada TW II dan IV
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	755.800.000	717.556.100	160.196.268	22,33%	557.359.832		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.02.2, 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	755.800.000	717.556.100	160.196.268	22,33%	557.359.832		
3.31.02.2, 01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	395.000.000	367.681.100	156.477.768	42,56%	211.203.332	Adanya inovasi Edukasi batik yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta memperkenalkan batik sangat diminati oleh masyarakat/instansi/sekolah, untuk itu diperlukan peralatan edukasi lebih banyak dikarenakan meningkatnya peminat tsb. Kegiatan dukungan operasional UPTD sentra industri telah dilaksanakan sesuai schedule s/d TW II	- Perlu penambahan anggaran untuk inovasi edukasi batik (pengadaan peralatan edukasi) - Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal di TW III dan IV
3.31.02.2, 01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	360.800.000	349.875.000	3.718.500	1,06%	346.156.500	Pelaksanaan kegiatan direncanakan di TW III (DBHCHT), Kegiatan pameran Dekranasda di 3 lokasi/kota berbeda yang rencananya dilaksanakan pada TW III masih memerlukan dukungan yang cukup guna terselenggaranya kegiatan.	Perlu Penambahan anggaran untuk dukungan kegiatan pameran dekranasda, dan pameran APKASI
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	5.000.000	2.744.900	0	0,00%	2.744.900		
3.31.03.2, 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	5.000.000	2.744.900	0	0,00%	2.744.900		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							
3.31.03.2, 01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5.000.000	2.744.900	0	0,00%	2.744.900	Sudah sesuai kebutuhan, Verifikasi lapangan ke Perusahaan yang mengajukan rekomendasi terkait legalitas usaha/izin sudah mulai dilakukan (verifikasi di lapangan sdh dilaksanakan 4 kl pd TW I)	- Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran. - Melanjutkan pelaksanaan monev utk verifikasi di lapangan di TW III dan IV
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.000.000	1.649.800	0	0,00%	1.649.800		
3.31.04.2, 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000	1.649.800	0	0,00%	1.649.800		
3.31.04.2, 01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.000.000	1.649.800	0	0,00%	1.649.800	Sudah sesuai kebutuhan. Sampai denga TW II Belum ada pengajuan akun SIINas Baru	Tidak perlu penambahan /pengurangan anggaran.
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.016.456.446	19.811.255.946	9.332.868.395	47,11%	10.478.387.551		
2.17.01.2, 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	12.745.500	10.991.000	86,23%	1.754.500		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.2, 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	7.008.000	5.958.000	85,02%	1.050.000	Penyusunan dokumen perencanaan / Renstra OPD 2025-2029 memerlukan koordinasi yang intens dengan bidang teknis. Volume rapat penyusunan dokumen perencanaan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya	Perlu penambahan anggaran untuk rapat kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
2.17.01.2, 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	5.737.500	5.033.000	87,72%	704.500	Pelaksanaan evaluasi kinerja rutin dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Meningkatnya volume rapat koordinasi maupun desk evaluasi kinerja dengan bidang teknis karena ada tambahan beberapa item laporan yang harus di penuhi pada aplikasi SAKIP/Si Bily Jaim	Perlu penambahan anggaran untuk rapat kegiatan penyusunan dokumen evaluasi
2.17.01.2, 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.513.393.64 6	16.513.333.646	8.034.651.959	48,66%	8.478.681.687		
2.17.01.2, 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.513.393.64 6	16.513.333.646	8.034.651.959	48,66%	8.478.681.687	Penyesuaian besar anggaran sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN	Perlu pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN
2.17.01.2, 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.000.000	153.096.000	81.829.400	53,45%	71.266.600		
2.17.01.2, 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.000.000	2.038.000	29,11%	4.962.000	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu, namun masih diperlukan untuk pengadaan peralatan jaringan	Perlu penambahan anggaran untuk untuk pengadaan peralatan jaringan internet penunjang kegiatan kantor pusat batik sukowati dan UPTD metrologi

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							internet penunjang kegiatan kantor pusat batik sukotawi dan UPTD metrologi	
2.17.01.2, 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	27.625.000	14.104.000	51,06%	13.521.000	Sudah sesuai kebutuhan	Tidak perlu penambahan/ pengurangan anggaran
2.17.01.2, 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	34.971.000	30.576.500	87,43%	4.394.500	Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor telah sesuai dengan realisasi kebutuhan s/d TW II. Meningkatnya volume tamu/kunjungan kerja di Diskumindag perlu penyesuaian anggaran untuk penambahan	Perlu penambahan anggaran untuk kebutuhan logistik kantor (belanja makanan dan minuman jamuan tamu)
2.17.01.2, 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	21.000.000	13.353.400	63,59%	7.646.600	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan kebutuhan, namun masih diperlukan penambahan anggaran belanja spanduk /MMT untuk pasar yang semula belum teranggarkan pada penetapan APBD 2025	Perlu penambahan anggaran untuk pengadaan cetak spanduk/MMT bagi pasar yang dikelola
2.17.01.2, 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	62.500.000	21.757.500	34,81%	40.742.500	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan realisasi kebutuhan perjalanan Dinas, namun diperlukan penambahan untuk perjalanan dinas karena meningkatnya volume perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi kegiatan KDMP	Perlu penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas
2.17.01.2, 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.649.000	306.284.000	8.800.000	2,87%	297.484.000		

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.2, 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	118.195.000	0	0,00%	118.195.000	Sudah sesuai kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada TW III.	Tidak perlu penambahan/ pengurangan anggaran
2.17.01.2, 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.953.000	80.713.000	0	0,00%	80.713.000	Kegiatan direncanakan pada TW III, diperlukan penyesuaian anggaran pada rekening belanja disesuaikan dengan kebutuhan prioritas	Perlu pengurangan anggaran pada rekening belanja personal Computer (laptop)
2.17.01.2, 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.696.000	107.376.000	8.800.000	8,20%	98.576.000	Sampai dengan TW II kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pengadaan sarpras (AC), sarpras yang lain sesuai jadwal dilaksanakan pada TW III. Namun diperlukan penambahan sarpras kantor untuk mendukung ruang kantor sekretariat Dekranasda dan ruang gallery kerajinan SIKK	Perlu penambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana kantor
2.17.01.2, 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.475.536.000	1.459.526.000	580.537.631	39,78%	878.988.369		
2.17.01.2, 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.226.400.000	1.226.400.000	481.632.131	39,27%	744.767.869	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan riil kebutuhan. Penyesuaian anggaran diperlukan berdasarkan perhitungan baru untuk kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD	Perlu dilakukan pengurangan anggaran sesuai dengan perhitungan baru kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD
2.17.01.2, 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.890.000	9.980.000	5.927.000	59,39%	4.053.000	Kegiatan pada anggaran penetapan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun seiring berjalannya waktu banyak komputer pasar yang	Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan komputer

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							memerlukan perawatan yang lebih intensif dikarenakan kondisi yang sudah lama dan sering rusak.	
2.17.01.2, 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.246.000	223.146.000	92.978.500	41,67%	130.167.500	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan kebutuhan. Perlu penyesuaian terkait honor tenaga pelayanan umum karena diterima sebagai PPPK	Perlu pengurangan anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
2.17.01.2, 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.877.800	1.366.270.800	616.058.405	45,09%	750.212.395		
2.17.01.2, 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	910.870.000	839.344.000	334.122.605	39,81%	505.221.395	Kegiatan rutin berupa alokasi Biaya BBM kendaraan Dinas, Pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan sampai dengan TW II, namun kendaraan/armada sampah pasar banyak yang kondisinya membutuhkan perbaikan yang lebih banyak karena kondisinya rusak berat	Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan / perbaikan berat armada sampah di pasar.
2.17.01.2, 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	509.311.800	508.291.800	273.930.800	53,89%	234.361.000	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Gedung kantor sudah proses pelaksanaan, namun masih diperlukan biaya untuk optimalisasi gedung SIKK dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif melalui penambahan /rehab bangunan gedung ruang Galleri Kerajinan SIKK dan	Perlu penambahan anggaran untuk Rehab Gedung Ruang Gallery Kerajinan SIKK dan ruang kantor sekretariat Dekranasda

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN TH 2025	ANGGARAN PERGESERAN TH 2025	REALISASI TW II TH 2025		SISA ANGGARAN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
				TOTAL	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							ruang kantor Sekeretariat Dekranasda	
2.17.01.2, 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.696.000	18.635.000	8.005.000	42,96%	10.630.000	Sarana Prasaran kantor yang baik sangat menunjang dalam kelancaran aktivitas kerja. Beberapa Pemeliharaan /perbaikan sarpras yang rusak belum teranggarkan dalam penetapan APBD 2025.	Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasana kantor guna menunjang kelancaran aktivitas kerja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah **“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”**. Dalam mewujudkan visi, Kabupaten Sragen memiliki misi jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-3 yaitu **“PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN KETAHANAN PANGAN”**. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen menyelenggarakan fungsi/uraian tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;

4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026, sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase Koperasi Sehat

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Koperasi dalam rangka pengembangan UMKM;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah koperasi sehat tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikali 100%.

2. Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Mikro

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan UMKM;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah usaha mikro yang dibina untuk peningkatan aset dan omsetnya di tahun n dibagi Jumlah total usaha mikro di Kabupaten Sragen dikali 100%.

3. Persentase Koperasi Aktif

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Koperasi dalam rangka pengembangan UMKM;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah koperasi aktif tahun n dibagi jumlah total koperasi di Kabupaten Sragen dikali 100%.

4. Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Aset dan Omset

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan UMKM;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah usaha mikro yang dibina untuk peningkatan aset dan omsetnya di tahun n dibagi Jumlah total usaha mikro di Kabupaten Sragen dikali 100%.

5. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Sragen;
- b) Formulasi pengukuran: $(\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun } (n) - \text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun } (n - 1))$ dibagi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun $(n - 1)$ dikali 100%;
- c) Perubahan penetapan target IKU Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

6. Persentase Sarpras Perdagangan dalam Kondisi Baik

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan sarpras perdagangan dalam kondisi baik;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik di tahun n dibagi Jumlah sarpras perdagangan di tahun n dikali 100%.

7. Persentase Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah komoditas stabil sesuai CV (Coefisien Variatif) di tahun n dibagi Jumlah komoditas yang dipantau di tahun n dikali 100%.

8. Persentase IKM/UMKM Pelaku Ekspor

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan IKM/UMKM pelaku ekspor;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah IKM/UMKM pelaku ekspor di tahun n dibagi Jumlah IKM/UMKM potensial ekspor di tahun n dikali 100%.

9. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor perindustrian pada PDRB Kabupaten Sragen;
- b) Formulasi pengukuran: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun (n) dikurangi Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun $(n - 1)$ dibagi Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun $(n - 1)$ dikali 100%.

10. Persentase Pertumbuhan Industri

- a) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan industri;
- b) Formulasi pengukuran: Jumlah industri di tahun (n) dikurangi Jumlah industri di tahun $(n - 1)$ dibagi Jumlah industri di tahun $(n - 1)$ dikali 100%.

Tabel 3. 1
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan OPD	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Akhir RPJMD
					2020	2021 (perkiraan capaian sampai akhir th)	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan	Memberdayakan koperasi dalam rangka pengembangan UMKM	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian	Persentase koperasi sehat	%	24,50	n/a	25,60	26,80	27,90	29,00	30,10	30,1
			Prosentase Koperasi Aktif	%	18	n/a	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
		Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	%	1,30	n/a	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat aset dan omsetnya	%	1,30	n/a	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50
	Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	-1,47	0,39	0,55	0,66	4,98	5,03	5,08	5,08

Misi	Tujuan OPD	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Akhir RPJMD
					2020	2021 (perkiraan capaian sampai akhir th)	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah		persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	%	40,42	42,81	44,01	45,51	47,31	49,40	51,80	51,80
			Persentase Tingkat Stabiliitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	88,88	88,88	88,88	77,77	83,33	77,77	88,88	88,88
			Persentase IKM/UMKM Pelaku Ekspor	%	0	0	0,67	1,33	1,33	2,00	2,67	2,67
	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	%	1,18	0,27	0,32	0,37	5,76	5,81	5,86	5,86
			Persentase pertumbuhan industri	%	0,64	0,26	0,31	0,36	2,68	2,73	2,78	2,78

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri pada PDRB mulai tahun 2024 berubah targetnya dikarenakan adanya perubahan pengambilan data BPS dengan pertimbangan bahwa menurut pedoman BPS Analisis pertumbuhan menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sedangkan perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Industri yang dimulai tahun 2024 dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Sragen sangat pesat beberapa tahun terakhir (sesuai data tahun 2022 dan tahun 2023). Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca pandemi *covid-19*, fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal kemudahan perizinan, fasilitasi pelatihan/ bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Sragen bagi IKM/UMKM untuk meningkatkan kualitas SDM Industri, serta semakin berkembangnya inovasi teknologi dalam hal digital marketing sehingga merangsang perkembangan sektor ekonomi khususnya industri baru.

3.2. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen berfokus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sragen khususnya misi ketiga yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**, serta 10 (sepuluh) indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen pada penetapan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Program : 16 Program
- 2) Jumlah Kegiatan : 24 Kegiatan
- 3) Jumlah Subkegiatan : 41 Subkegiatan
- 4) Total Pagu : Rp. 25.171.449.446,-

Perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional dan kondisi daerah. Oleh karena itu, dilakukan refocusing anggaran untuk mengalihkan sebagian belanja dari kegiatan yang bersifat kurang prioritas ke program

yang lebih strategis, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi desa, serta peningkatan layanan publik yang mendesak. Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan program kerja tetap efektif, efisien, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Pagu setelah refocusing anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjadi **Rp. 24.545.106.446,-**.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa program dan kegiatan. Beberapa kegiatan yang bersifat kurang prioritas dialihkan anggarannya untuk mendukung kegiatan strategis dan mendesak. Sebagai contoh adalah keberadaan Pasar merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Karena Pasar sebagai sarana distribusi perdagangan berperan penting dalam kegiatan jual beli di masyarakat serta menjadi tujuan utama masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok baik berupa bahan pangan maupun sandang. Untuk itu diperlukan dukungan dana dari Pemerintah guna memfasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) di wilayah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan anggaran untuk pengelolaan sarana / prasarana distribusi perdagangan yang salah satunya adalah Pemeliharaan/perbaikan ringan pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen secara rutin setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan/perbaikan ringan pasar untuk beberapa pasar secara bergantian. Penambahan anggaran pada Perubahan APBD TA 2025 Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan diperlukan untuk Pemeliharaan/perbaikan ringan sebanyak 6 Pasar, yakni Pasar Masaran, Pasar Tanon, Pasar Sukowati, Pasar Sambungmacan, Pasar Sukodono dan Pasar Bunder.

Selain itu sebagai pusat promosi, pemasaran, dan pameran produk unggulan daerah, khususnya karya kriya, kerajinan, dan UMKM/IKM kreatif, penambahan anggaran juga diperlukan pada Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk Rehab/Pembangunan kantor Sekretariat Dekranasda dan Gallery Kerajinan yang berada di Gedung SIKK (Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan), hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal melalui penyediaan ruang yang representatif untuk display, promosi, branding, dan transaksi.

Terkait dengan visi Presiden RI salah satunya mendorong pembangunan ekonomi desa yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, pada anggaran perubahan ditambahkan pula pada Subkegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota guna pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Renja Perubahan Tahun 2025:

- | | | |
|----|--------------------|------------------------|
| 1) | Jumlah Program | : 16 Program |
| 2) | Jumlah Kegiatan | : 24 Kegiatan |
| 3) | Jumlah Subkegiatan | : 42 Subkegiatan |
| 4) | Total Pagu | : Rp. 25.122.596.446,- |

Perbandingan program dan kegiatan serta anggaran antara Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 dengan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Sragen	4,2 %	16.799.000	DAU	Kab. Sragen	4,2 %	16.799.000	DAU	0	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sragen	23,9 %	16.799.000	DAU	Kab. Sragen	23,9 %	16.799.000	DAU	0	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	207 unit usaha	16.799.000	DAU	Kab. Sragen	207 unit usaha	16.799.000	DAU	0	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Sragen	27.9 %	28.732.700	DAU	Kab. Sragen	27.9 %	58.732.700	DAU	30.000.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	164 unit usaha	28.732.700	DAU	Kab. Sragen	164 unit usaha	58.732.700	DAU	30.000.000	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	168 unit usaha	28.732.700	DAU	Kab. Sragen	168 unit usaha	58.732.700	DAU	30.000.000	Penambahan anggaran untuk biaya pameran dalam rangka Hari Koperasi Nasional (sewa stand dan

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dekorasi 11.043.000, perjalanan dinas semarang+jakart a 17.322.000, sewa kendaraan 1.635.000)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Sragen	78%	9.614.000	DAU	Kab. Sragen	78%	9.614.000	DAU	0	
2.17.05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	62%	9.614.000	DAU	Kab. Sragen	62%	9.614.000	DAU	0	
2.17.05. 2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Sragen	45 orang	9.614.000	DAU	Kab. Sragen	45 orang	9.614.000	DAU	0	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Sragen	3%	14.722.000	DAU	Kab. Sragen	3%	118.722.000	DAU	104.000.000	
2.17.06. 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	66%	14.722.000	DAU	Kab. Sragen	66%	118.722.000	DAU	104.000.000	
2.17.06. 2.01.04	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen		-	DAU	Kab. Sragen	208 unit usaha	104.000.000	DAU	104.00.000	Fasilitasi pembuatan akta notaris Koperasi Desa Merah Putih (208 KDMP)

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.06. 2.01.05	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	75 unit usaha	14.722.000	DAU	Kab. Sragen	75 unit usaha	14.722.000	DAU	0	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Sragen	1,20%	117.869.000	DAU	Kab. Sragen	1,20%	83.674.280	DAU	(34.194.720)	
2.17.07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Sragen	5,30%	117.869.000	DAU	Kab. Sragen	5,30%	83.674.280	DAU	(34.194.720)	
2.17.07. 2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Sragen	285 unit usaha	86.994.800	DAU	Kab. Sragen	200 unit usaha	50.891.600	DAU	(36.103.200)	Pengurangan anggaran pada rekening Belanja registrasi 30.000.000, Belanja Perjalanan Dinas dalam kota 6.000.000, ATK 103.200 (keg. Fasilitasi pendaftaran merk)

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.07. 2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sragen	35 unit usaha	2.500.000	DAU	Kab. Sragen	35 unit usaha	4.408.480	DAU	1.908.480	Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan Monev UMKM pasca diberi pelatihan bagi (pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 468.750, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 765.000, ATK 674.730)
2.17.07. 2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sragen	200 orang	28.374.200	DAU	Kab. Sragen	200 orang	28.374.200	DAU	0	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Sragen	20,43%	1.166.050.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	20,43%	1.175.540.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	9.490.000	
2.17.08. 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Sragen	20,43%	1.166.050.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	20,43%	1.175.540.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	9.490.000	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.08. 2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sragen	81 unit usaha	1.166.050.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	141 unit usaha	1.175.540.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	9.490.000	Penambahan anggaran untuk pelatihan/Bimte k dan pengadaan Bantuan peralatan bagi UMKM
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sragen	100%	19.813.296.446	DAU	Kab. Sragen	100%	19.843.748.298	DAU	30.451.852	
2.17.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	8 dokumen	14.786.000	DAU	Kab. Sragen	8 dokumen	25.623.500	DAU	10.837.500	
2.17.01. 2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	4 dokumen	7.008.000	DAU	Kab. Sragen	4 dokumen	12.108.000	DAU	5.100.000	Tambahan anggaran untuk Belanja makanan dan Minuman Rapat penyusunan dokumen perencanaan (30 org x 42.500 x 4 kl)
2.17.01. 2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	12 dokumen	5.737.500	DAU	Kab. Sragen	12 dokumen	13.515.500	DAU	7.778.000	Tambahan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja (27 org x 42.500 x 5 kl)

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	14 bulan	16.513.333.646	DAU	Kab. Sragen	14 bulan	16.238.333.646	DAU	(275.000.000)	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	143 orang/bulan	16.513.333.646	DAU	Kab. Sragen	142 orang/bulan	16.238.333.646	DAU	(275.000.000)	Pengurangan anggaran pada gaji pokok dikarenakan banyaknya ASN yang purna tugas
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sragen	12 bulan	153.096.000	DAU	Kab. Sragen	12 bulan	186.060.000	DAU	32.964.000	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen	12 paket	7.000.000	DAU	Kab. Sragen	12 paket	9.860.000	DAU	2.860.000	Tambahan anggaran untuk pengadaan Mikrotik (jaringan internet/intranet kantor)
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	12 paket	27.625.000	DAU	Kab. Sragen	12 paket	27.625.000	DAU	0	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen	12 paket	34.971.000	DAU	Kab. Sragen	12 paket	43.550.000	DAU	8.579.000	Tambahan anggaran untuk Penambahan Belanja makanan dan minuman jamuan tamu
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sragen	12 paket	21.000.000	DAU	Kab. Sragen	12 paket	27.525.000	DAU	6.525.000	Penambahan anggaran untuk Biaya MMT bagi 45 Pasar di Kab.

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Sragen (45 pasar x 145.000)
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sragen	12 laporan	62.500.000	DAU	Kab. Sragen	12 laporan	77.500.000	DAU	15.000.000	Tambahan anggaran untuk penambahan Biaya Perjalanan Dinas (luar daerah)
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sragen	84 unit	306.284.000	DAU	Kab. Sragen	84 unit	396.987.000	DAU	78.497.320	
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sragen	1 unit	118.195.000	DAU	Kab. Sragen	1 unit	118.195.000	DAU	0	
2.17.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sragen	5 unit	80.713.000	DAU	Kab. Sragen	4 unit	66.581.000	DAU	(14.132.000)	Pengurangan anggaran dari : pengadaan laptop, 3 unit @ 16.153.000, pengadaan LCD (indoor) 1 unit @ 20.564.000. Penambahan anggaran untuk : Pengadaan komputer (untuk pasar) 1 unit @ 16.673.000, pengadaan printer thermal kasir (gallery SIKK) 1 unit @

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											4.800.000, Pengadaan LCD (Indoor+outdoor) untuk SIKK 1 unit @ 32.349.000, serta penambahan ATK 1.069.000
2.17.01. 2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sragen	25 unit	107.376.000	DAU	Kab. Sragen	32 unit	212.211.000	DAU	104.835.000	Penambahan anggaran untuk : pengadan sarana prasarana kantor sekretariat Dekranasda dan gallery kerajinan SIKK (108.448.000), pengadaan papan nama neon box Dekranasda/SIK K (1 unit @ 25 jt), pengadaan router internet di SIKK 1 unit @ 6.532.000, pengadaan papan nama sentra mebel 1 unit @ 900.000, pengadaan mic kabel 2 unit @

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											1.298.000, dan ATK @ 420.000 Pengurangan anggaran pada : pengadaan Ac 1 unit, @ 8.807.000 pengadaan gordyn kantor metro 30.254.000
2.17.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	12 bulan	1.459.526.000	DAU	Kab. Sragen	12 bulan	1.324.757.000	DAU	(134.769.000)	
2.17.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen	12 laporan	1.226.400.000	DAU	Kab. Sragen	12 laporan	1.113.600.000	DAU	(112.800.000)	Pengurangan anggaran pada rekening biaya Air (31.200.000) dan biaya listrik 84.000.000) Menyesuaikan kebutuhan adcost, Penambahan anggaran pada rekening belanja internet utk pasar (2.400.000)
2.17.01. 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	12 laporan	9.980.000	DAU	Kab. Sragen	12 laporan	11.440.000	DAU	1.460.000	Penambahan anggaran untuk Biaya

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											pemeliharaan komputer pasar
2.17.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen	12 laporan	223.146.000	DAU	Kab. Sragen	12 laporan	199.717.000	DAU	(23.429.000)	Pengurangan anggaran pada rek. Belanja Jasa pelayanan umum (2 org x 7 bln x 1.673.500)
2.17.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	12 bulan	1.366.270.800	DAU	Kab. Sragen	12 bulan	1.671.987.152	DAU	305.716.352	
2.17.01. 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sragen	87 unit	839.344.000	DAU	Kab. Sragen	89 unit	864.344.000	DAU	25.000.000	Penambahan anggaran untuk perbaikan / pemeliharaan armada pengangkut sampah pasar (dumptruck, dan armada sampah lainnya) yang kondisinya rusak berat
2.17.01. 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen	2 unit	508.291.800	DAU	Kab. Sragen	3 unit	760.308.152	DAU	252.016.352	Penambahan anggaran guna Pembangunan kantor sekretariat dekranasda dan galeri SIKK+Jasa akonsultasni

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											perencanaan dan pengawasannya (271.692.352), ATK (406.000). Pengurangan anggaran pada : honor tenaga keamanan yang mengundurkan diri (2 org x 6 bln x 1.673.500)
2.17.01. 2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sragen	24 unit	18.635.000	DAU	Kab. Sragen	71 unit	47.335.000	DAU	28.700.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan/ perbaikan papan nama dinas yang ada di 45 pasar (13.500.000, biaya perbaikan escalator PBS (4 unit x 3 kl x 600.000), biaya perbaikan instalasi listrik PBS (8.000.000)
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Sragen	45,83%	11.600.000	DAU	Kab. Sragen	45,83%	21.600.000	DAU	10.000.000	
3.30.02. 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Sragen	5 kali	11.600.000	DAU	Kab. Sragen	5 kali	21.600.000	DAU	10.000.000	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.02. 2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sragen	22 dokumen	11.600.000	DAU	Kab. Sragen	22 dokumen	21.600.000	DAU	10.000.000	Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan sosialisasi kpd toko mpdern perseorangan/n on jejaring yang potensial, meliputi biaya honor narasumber, uang saku peserta, bel. makanan dan minuman utk peserta, perjalanan dinas
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Sragen	56,52%	2.378.453.500	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	56,52%	2.613.455.235	DAU, Dana Insentif Fiskal	235.001.735	
3.30.03. 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sragen	26 pasar	2.351.933.500	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	26 pasar	2.586.935.235	DAU, Dana Insentif Fiskal	235.001.735	
3.30.03. 2.01.0001	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Sragen	8 unit	396.380.500	DAU	Kab. Sragen	14 unit	646.380.500	DAU	250.000.000	Penambahan anggaran untuk perbaikan / pemeliharaan

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											ringan Pasar Sukowati, Masaran, Bunder, Sukodono, Sambungmacan, Tanon
3.30.03. 2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sragen	45 unit	1.955.553.000	DAU, Dana Insentif Fiskal	Kab. Sragen	45 unit	1.940.554.735	DAU, Dana Insentif Fiskal	(14.998.265)	
3.30.03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Sragen	45 pasar	26.520.000	DAU	Kab. Sragen	45 pasar	26.520.000	DAU	0	
3.30.03. 2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sragen	3 dokumen	15.672.500	DAU	Kab. Sragen	3 dokumen	15.672.500	DAU	0	
3.30.03. 2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sragen	5 dokumen	10.847.500	DAU	Kab. Sragen	5 dokumen	10.847.500	DAU	21.700.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Sragen	91,38%	30.470.000	DAU	Kab. Sragen	91,38%	32.755.000	DAU	2.285.000	
3.30.04. 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sragen	100%	9.127.000	DAU	Kab. Sragen	100%	14.127.000	DAU	5.000.000	
3.30.04. 2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sragen	40 laporan	9.127.000	DAU	Kab. Sragen	40 laporan	14.127.000	DAU	5.000.000	Penambahan anggaran untuk sosialisasi BBM dan LPG (Uang saku peserta)

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	69,57%	11.628.000	DAU	Kab. Sragen	69,57%	16.628.000	DAU	5.000.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	90 laporan	11.628.000	DAU	Kab. Sragen	90 laporan	16.628.000	DAU	5.000.000	Penambahan anggaran untuk pemantauan /monev Harga dan Stok Bapokting menjelang HBKN / Menjelang Natal dan Tahun Baru dan Belanja Makanan minuman rapat koordinasi hasil monev.
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	100%	9.715.000	DAU	Kab. Sragen	100%	2.000.000	DAU	(7.715.000)	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Sragen	35 laporan	9.715.000	DAU	Kab. Sragen	1 laporan	2.000.000	DAU	(7.715.000)	Pengurangan anggaran pada semua rekening yang belum terealisasi anggarannya. Sesuai Perpres No 6 Tahun 2025 Tata Kelola Pupuk

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Bersubsidi bahwa pengawasan pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Sragen	1,33%	13.399.000	DAU	Kab. Sragen	1,33%	18.399.000	DAU	0	
3.30.05. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	1 kali	13.399.000	DAU	Kab. Sragen	1 kali	18.399.000	DAU	5.000.000	
3.30.05. 2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Sragen	50 pelaku usaha	13.399.000	DAU	Kab. Sragen	50 pelaku usaha	18.399.000	DAU	5.000.000	Penambahan anggaran untuk mendukung keg sosialisasi ekspor (penambahan pada uang saku peserta sosialisasi, perjalanan dinas monev UKM/IKM potensial ekspor)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Sragen	80,87%	102.262.000	DAU	Kab. Sragen	80,87%	107.262.000	DAU	5.000.000	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Sragen	20 kecamatan	102.262.000	DAU	Kab. Sragen	20 kecamatan	107.262.000	DAU	5.000.000	
3.30.06. 2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Sragen	5608 unit	97.562.000	DAU	Kab. Sragen	5608 unit	102.562.000	DAU	5.000.000	Penambahan anggaran untuk Biaya pengadaan SKHP 4.500.000 dan ATK 500.000
3.30.06. 2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Sragen	650 orang	4.700.000	DAU	Kab. Sragen	650 orang	4.700.000	DAU	0	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Sragen	60%	119.888.000	DAU	Kab. Sragen	60%	127.603.000	DAU	0	
3.30.07. 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Sragen	1 kali	119.888.000	DAU	Kab. Sragen	1 kali	127.603.000	DAU	7.715.000	
3.30.07. 2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	25 UMKM	119.888.000	DAU	Kab. Sragen	25 UMKM	127.603.000	DAU	7.715.000	Penambahan anggaran untuk Belanja perjalanan dinas kegiatan solo raya great sale
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Sragen	3,13%	717.556.100	DAU, DBHCHT, DAK NON FISIK	Kab. Sragen	3,13%	890.297.233	DAU, DBHCHT, DAK NON FISIK	172.741.133	
3.31.02. 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	66 unit	717.556.100	DAU, DBHCHT,	Kab. Sragen	66 unit	890.297.233	DAU, DBHCHT,	172.741.133	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					DAK NON FISIK				DAK NON FISIK		
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sragen	3 dokumen	367.681.100	DAU	Kab. Sragen	3 dokumen	375.966.600	DAU	8.285.500	Penambahan anggaran untuk pembelian peralatan edukasi membatik (canting, kain mori, malam, pewarna)
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sragen	2 dokumen	349.875.000	DAU, DBHCHT, DAK NON FISIK	Kab. Sragen	3 dokumen	514.330.633	DAU, DBHCHT, DAK NON FISIK	164.455.633	Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan pameran dekranasda 89.455.633 (Biaya Dekorasi, pengiriman barang, sewa truck/pickup, perjalanan dinas, biaya sewa stand, ATK) dan pameran APKASI sebesar 75.000.000 (biaya sewa stand, biaya perjalanan dinas,

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Biaya dekorasi, belanja alat/bahan, banner, cetak buku/leaflet, stopmap, foto copy)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Sragen	100%	2.744.900	DAU	Kab. Sragen	100%	2.744.900	DAU	0	
3.31.03. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	14 dokumen	2.744.900	DAU	Kab. Sragen	14 dokumen	2.744.900	DAU	0	
3.31.03. 2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Sragen	1 dokumen	2.744.900	DAU	Kab. Sragen	1 dokumen	2.744.900	DAU	0	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Sragen	42,55%	1.649.800	DAU	Kab. Sragen	42,55%	1.649.800	DAU	0	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pergeseran Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025				Tambah / Kurang	Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	40 unit	1.649.800	DAU	Kab. Sragen	40 unit	1.649.800	DAU	0	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Sragen	1 dokumen	1.649.800	DAU	Kab. Sragen	1 dokumen	1.649.800	DAU	0	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 merupakan penjabaran prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 yang telah disinkronkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian RPJMD sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai target visi, misi, tujuan, dan sasaran maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi capaian indikator:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720912 199202 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Raya Sukowati No. 21 Sragen Telp. (0271) 891017, Fax. (0271) 894960

S R A G E N 5 7 2 1 2

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 024.2/4401 /08/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 000.7.2.4/324/23/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
1. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen: rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tahun 2025;
 2. menyampaikan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana poin 1 kepada Tim Teknis verifikasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen;
 3. menindaklanjuti hasil verifikasi pada poin 2, sebelum dilakukan pengesahan Kepala Dinas.
- KEENAM : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720912 199203 1 004

Salinan disampaikan kepada
Yth.:

1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab.Sragen;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 024.2/4401/08/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cosmas Edwi Yunanto, S.Sos	Kepala Dinas	Pembina
2.	R.Widya Budi Muditha, S.Sos,M.Si	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Aan Suyitno, S.E.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Anggota
4.	Elisabeth Bina Sri Astuti, S.Sos	Kepala Bidang Koperasi	Anggota
5.	Betty Listyorini, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
6.	Sri Sumarsih, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Etik Yulianti	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	YUSUF BACHTIAR, A.Md.Kom	JF Pranata Komputer Terampil	Anggota
9.	Didik Mayur Hartanto, A.Md.	JF Pranata Komputer Terampil	Anggota

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720912 199203 1 004